

International Law Making



Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)¹

Latar Belakang (*Background*)

Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan mitra kerja sama ekonomi penting bagi Indonesia. Untuk semakin mempererat kerja sama dan kemitraan tersebut dalam menghadapi era perdagangan dan pasar bebas, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk menyusun suatu perjanjian kemitraan bilateral, yang kemudian dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 20 Agustus 2007. Dengan adanya IJEPA, ada langkah baru dalam hubungan Jepang dan Indonesia, yakni dengan terbentuknya hubungan ekonomi melalui kerja sama bilateral dalam peningkatan kapasitas liberalisasi, baik di bidang jasa maupun di bidang barang, promosi dan fasilitasi perdagangan, dan investasi di antara kedua negara². IJEPA juga akan mengakomodasi sejumlah proyek peningkatan kapasitas pada sejumlah aktifitas-aktifitas yang akan meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam bidang industri, pertanian, dan kehutanan termasuk inisiatif bersama untuk mempromosikan industri manufaktur³.

¹ http://www.kadin-indonesia.or.id/id/berita_isi.php?news_id=213

² <http://www.antara.co.id/arc/2007/7/3/pertemuan-tahap-finalisasi-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ij-epa-tokyo-jepang-21/>

³ *Ibid.*

Konsep (Concept)

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement yang disingkat dengan IJEPA merupakan suatu perjanjian kerja sama bilateral di bidang ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Perjanjian ini merupakan perjanjian kemitraan ekonomi bilateral pertama yang dibuat oleh Indonesia. Dalam perjanjian ini, kedua negara banyak menyepakati hal-hal perekonomian, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan sumber daya energi dan mineral. Perjanjian ini juga mencakup sebelas kelompok perundingan, yakni *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Persons, Government Procurement, Intellectual Property Rights, Competition Policy, Energy and Mineral Resources*, dan *Cooperation*.

Keberlakuan (Entry into Force)

Perjanjian ini berlaku 13 hari setelah Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia telah saling menukarkan catatan diplomatiknya yang menyatakan bahwa, melalui prosedur hukum nasional masing-masing negara, perjanjian ini telah berlaku. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 153 perjanjian ini.

Prinsip-prinsip Umum (General Principles)

Pada perjanjian ini diadopsi beberapa prinsip hukum umum, sebagai berikut:

1. *National Treatment*, merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Pasal III *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa

suatu produk impor harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.⁴

2. *Most Favoured Nations Treatment*, merupakan salah satu prinsip di dalam perdagangan internasional yang diatur dalam Pasal I GATT, yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dengan dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini suatu negara terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.⁵
3. *Transparency*, merupakan salah satu prinsip yang mewajibkan negara-negara untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁶

Materi Pokok (Main Features)

Perjanjian ini berisikan 15 Bagian dan 154 Pasal dengan materi-materi pokok, antara lain:

- (1) Bagian I mengatur mengenai Ketentuan Umum yang dimuat dalam 16 pasal mengenai tujuan, definisi umum, transparansi, prosedur ulasan publik, prosedur administratif, tinjauan dan banding, perlindungan administratif, tindakan perlawanan terhadap korupsi dan penyuapan, informasi rahasia, pajak, pengecualian umum dan pengamanan, hubungan dengan

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 111.

⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

⁶ Antonius Yudi Triantoro, *et al.*, *Sekilas WTO (World Trade Organization)* (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekeayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI), hlm. 4.

perjanjian lainnya, penerapan perjanjian, komite gabungan, sub-komite, dan komunikasi.

- (2) Bagian II mengatur tentang Perdagangan Barang. Di dalam kesebelas pasalnya diatur mengenai definisi, klasifikasi barang, perlakuan nasional, pengurangan bea cukai, penilaian kepabean, subsidi ekspor, *non-tarif*, *safeguards* bilateral, pembatasan terhadap *safeguards the balance of payments*, sub-komite dalam perdagangan barang, dan prosedur operasional dalam perdagangan barang kedua negara.
- (3) Bagian III mengatur tentang *Rules of Origin*, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 23 pasal. Di dalam kedua puluh tiga pasal tersebut diatur lebih terperinci tentang *Rules of Origin* di dalam hubungan kerja sama kedua negara, yakni *definitions*; *originating goods*; *accumulation*; *de minimis*; *non-qualifying operations*; *consignment criteria*; *unassembled or disassembled goods*; *fungible goods and materials*; *indirect materials*; *accessories, spare parts and tools*; *packaging materials and containers for shipment*; *packing materials and containers for shipment*; *claim for preferential tariff treatment*; *certificate of origin*; *obligations regarding exportations*; *request for checking of certification of origin*; *verification visit*; *determination of origin and preferential tariff treatment*; *confidentiality*; *penalties and measures against false declaration*; *miscellaneous*; dan *sub-committee on rules of origin*.
- (4) Bagian IV mengatur tentang Prosedur Kepabean, yang di dalamnya diatur lebih rinci mengenai ruang lingkup, definisi, transparansi, izin kepabean, kerja sama dan pertukaran informasi, dan sub-komite untuk prosedur kepabean.
- (5) Bagian V mengatur mengenai kegiatan investasi di kedua negara. Dalam bagian ini diatur 19 pasal mengenai ruang lingkup, perlakuan nasional, *most-favoured nations treatment*,

perlakuan umum, akses untuk pengadilan, pelarangan persyaratan pelaksanaan, reservasi dan pengecualian, pengambilalihan dan kompensasi, perlindungan terhadap perselisihan, peralihan, subrogasi, penyelesaian sengketa investasi di antara para pihak investor, tindakan temporal *safeguards*, tindakan *prudencial*, *denial of benefits*, pajak sebagai ekspropriasi, tindakan lingkungan, dan sub-komite dalam investasi.

- (6) Bagian VI mengatur tentang *Trade in Service* yang diperinci ke dalam 16 pasal mengenai *scope, definitions, market access, national treatment, additional commitments, schedule of spesific commitments, most-favoured nations treatment, autherization, licensing or qualification, mutual recognition, transparency, monopolis and exclusive service suppliers, payments and transfers, restrictions to safeguard the balance of payments, emergency safeguards measures, denial of benefits*, dan *sub-committee* dalam *trade in services*.
- (7) Bagian VII mengatur mengenai *movement of natural persons* di antara kedua negara dimana di dalamnya ditentukan *scope, definition, specific commitments, requirements and procedures*, dan *sub-committee on movement of natural persons* dari *movement of natural persons*.
- (8) Bagian VIII mengatur mengenai *energy and mineral resources*, yang lebih rinci ditentukan mengenai *definitions, promotions and facilitation of investment, import and export restrictions, export lincensing procedures and administrations, energy and mineral resources regulatory measures, environment aspects, community development, cooperation*, dan *sub-committee on energy and mineral resources*.
- (9) Bagian IX mengatur mengenai *intellectual property*, yang kemudian dalam pasal-pasal nya diatur lebih lanjut *general provisions, definitions, national treatment and most-favoured nations treatment, procedural matters, transparency*,

promotion of public awareness of protection of intellectual property, patents, industrial designs, trademarks, copyright and related rights, new varieties of plants, acts of unfair competition, protection of undisclosed information, enforcement-border measures, enforcement-civil remedies, enforcement-criminal remedies, cooperation, dan sub-committee on intellectual property.

- (10) Bagian X mengatur mengenai *Government Procurement*. Dalam lingkup ini diatur lebih rinci mengenai *exchange of information* dan *sub-committee on government procurement* dalam hubungan kedua negara.
- (11) Bagian XI mengatur mengenai *Competition*. Dalam bagian ini ditentukan hal-hal yang berkaitan dengan *competition*, seperti *promotion of competition by addressing anti-competitive activities, cooperation on the promotion of competition, non-discrimination, procedural fairness, dan non-application of Paragraph 2 of Article 9.*
- (12) Bagian XII mengatur mengenai *Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence* yang lebih rinci menentukan *basic principles, sub-committee on improvement of business environment and promotion of business confidence, dan liaison office on improvement of business environment.*
- (13) Bagian XIII mengatur mengenai *Cooperation*, yang lebih rinci menentukan *basic principles, areas and forms of cooperation, cost of cooperation, sub-committee on cooperation.* Ketentuan dalam hal ini ditujukan untuk mengatur mengenai prinsip dasar dari kerja sama yang akan dilakukan di antara kedua negara. Prinsip dasar ini berfungsi untuk mendukung liberalisasi dan memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi, dengan tujuan tersebut kedua negara akan bekerja

sama untuk mendukung dan memfasilitasi dimana perlu dalam bidang-bidang tertentu.

- (14) Bagian XIV mengatur mengenai *Dispute Settlement*, yang terbagi lebih rinci menentukan *scope; general principle; consultations, good offices, conciliation or mediation, establishment of arbitral tribunals, functions of arbitral tribunals, proceedings of arbitral tribunals, suspension and termination of proceedings, implementation of award, modification of time periods, dan expenses* dari proses *dispute settlement*.
- (15) Bagian XV mengatur mengenai *Final Provisions*, yang di dalamnya ditentukan mengenai *table of contents and headings, annexes and notes, general review, amendment, dan entry into force*, serta *termination*.

Peraturan Tambahan (Annexes)

Dalam perjanjian ini, terdapat duabelas Peraturan Tambahan (*Annexes*). Keduabelas peraturan tambahan ini mengatur beberapa ketentuan lebih lanjut yang mengacu pada pasal-pasal sebelumnya yang ditentukan di dalam perjanjian ini, seperti dalam *Annex 1 referred to in Chapter 2 Schedule in relation to Article 20*, dalam *Annex 2 referred to in Chapter 3 Product Specific Rules*, dalam *Annex 3 referred to in Chapter 3 Minimum Data Requirement for Certificate of Origin*, dalam *Annex 4 referred to in Chapter 5 Reservations for Measures referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 64*, dalam *Annex 5 referred to in Chapter 5 Reservation for Measures referred to in Paragraph 3 of Article 64*, dalam *Annex 6 referred to in Chapter 5 Additional Provisions with respect to the Settlement of Investment Dispute referred to in Paragraph 21 of Article 81*, dalam *Annex 7 referred to in Chapter 6 Financial Services*, dalam *Annex 8 referred to in Chapter 6 Schedules of Specific Commitments in relation to Article 81*, dalam *Annex 9 referred to in Chapter 6 Lists of Most-Favoured-Nation Treatment Exemptions in relation to Article 82*, dalam *Annex 10 referred to in*

Chapter 7 Specific Commitment for the Movement of Natural Persons, dalam Annex 11 referred to in Chapter 8 List of Energy and Mineral Resources Goods, dan dalam Annex 12 referred to in Chapter 8 Additional Provisions with respect to the Promotion and Facilitation of Investment in the Energy and Mineral Resources Sector referred to in Paragraph 2 of Article 98.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Dispute*)

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bagian 14, Pasal 138-148. Pada prinsipnya ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa di antara kedua negara dalam mengimplementasikan perjanjian ini, maka kedua negara diharapkan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai. Namun, apabila hal ini sudah tidak mungkin dilakukan, maka sengketa yang terjadi tersebut dapat diselesaikan melalui *Consultations* (Pasal 140), *Good Offices, Conciliations or Mediation* (Pasal 141), dan *Arbitral Tribunals* (Pasal 142).

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Perjanjian ini terkait dengan perjanjian implementasinya, yakni *Implementation Agreement between the Government of Japan and the Government of Indonesia Pursuant to Article 13 of the Agreement between Japan and Republic of Indonesia for an Economic Partnership. (Anita Komala)*

Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade

Latar Belakang (*Background*)

Dalam *the Fourth ASEAN Summit* yang dilaksanakan di Singapura pada Januari 1992, ASEAN memprakarsai *the ASEAN*

⁷ <http://www.aseansec.org/1164.htm>

Free Trade Area atau yang dikenal juga dengan AFTA, yang meluncurkan suatu program komprehensif mengenai pengurangan tarif regional, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2008. Batas waktu inipun dimajukan hingga 2003. Guna melaksanakan program pengurangan tarif ini, maka dibutuhkan suatu mekanisme. Mekanisme inilah yang kemudian dituangkan dalam *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade* atau yang juga dikenal dengan singkatan CEPT. Kemudian, dalam beberapa tahun kemudian, program pengurangan tarif pun akan diperluas lingkungannya dan dipercepat. Sebagai tambahannya, ASEAN kemudian menandatangani perjanjian kerangka kerja mengenai liberalisasi perdagangan jasa dalam lingkup inter-regional ASEAN dan kerja sama dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual regional. Di samping itu, ASEAN telah kembali menegaskan komitmennya, berkaitan dengan AFTA, yaitu menyapakti bahwa negara-negara penandatangan perjanjian AFTA akan mempercepat waktu pemotongan tarif dalam jangka satu tahun, yaitu dari 2003 menjadi 2002.

Konsep (Concept)

Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade, atau yang juga disingkat dengan CEPT, merupakan salah satu perjanjian di antara negara-negara anggota ASEAN yang dibuat untuk mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara. Perjanjian ini khusus disepakati untuk mengatur mengenai tarif dalam pasar perdagangan bebas di wilayah tersebut, yang juga dikenal dengan *ASEAN Free Trade Area* atau AFTA. Dengan adanya perjanjian ini, maka lahirlah mekanisme dalam ASEAN berkaitan dengan tarif perdagangan barang-barang antarnegara anggota ASEAN. Melalui mekanisme tersebut, tarif perdagangan barang di antara negara-negara anggota ASEAN akan dikurangi 0-5% pada 2002/2003 bagi Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina; pada 2006 bagi Vietnam; pada 2008 bagi Laos dan Myanmar; serta pada 2010 bagi Kamboja, dari tarif perdagangan barang yang mencapai 40% di dalam pemenuhan

persyaratan ASEAN yang ada sebelumnya. Pengurangan-pengurangan tarif tersebut akan dilakukan melalui dua cara, yakni cara pengurangan yang cepat dan cara pengurangan yang biasa. Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk mengecualikan produk mereka dari CEPT, seperti produk yang tergolong *Temporary exclusions*, *Sensitive agricultural products*, dan *General exceptions*. Perjanjian ini diizinkan untuk dibentuk di bawah *AFTA Agreement* dan disebutkan di dalam *Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List*.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Perjanjian ini dibuat pada 28 Januari 1992 di Singapura, yang ditandatangani oleh Abdul Rahman Taib (Brunei Darussalam), Dr. Arifin M Siregar (Indonesia), Rafidah Aziz (Malaysia), Peter D Garucho, Jr. (Filipina), Lee Hsien Loong (Singapura), Amaret Sila-On (Thailand). Berdasarkan Pasal 10 (3) dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan, maka perjanjian ini pun berlaku pada 28 Januari 1992.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Perjanjian ini mengadopsi beberapa prinsip hukum umum, sebagai berikut:

1. *Non-Tariff Barriers*, yaitu tindakan-tindakan lain yang mengatur di samping mengatur hal tarif yang secara efektif melarang atau membatasi produk-produk impor atau ekspor di antara negara-negara anggota.
2. *Quantitative restrictions*, yaitu pelarangan ataupun pembatasan dalam perdagangan di antara negara-negara anggota, baik yang dibuat secara efektif melalui kuota, lisensi, maupun tindakan dengan efek penyeimbangan, termasuk tindakan administrasi dan persyaratan-persyaratan yang membatasi perdagangan.

3. *Foreign exchange restrictions*, yaitu tindakan negara-negara anggota dalam bentuk pembatasan dan prosedur administrasi lainnya dalam lingkup pertukaran asing yang memiliki efek dari pembatasan perdagangan.

Materi Pokok (Main Features)

Perjanjian ini berisikan 10 pasal, dimana kesepuluh pasal tersebut mengatur hal-hal yang dijelaskan di bawah ini:

Pasal 1: Definisi

Dalam pasal ini terdapat 7 ayat yang memberikan definisi-definisi beberapa istilah penting terkait dengan tujuan dibuatnya perjanjian ini, yakni:

1. CEPT berarti *the Common Effective Preferential Tariff* yang disepakati dan dikhususkan untuk ASEAN, untuk diberlakukan terhadap barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.
2. *Non-Tariff Barriers* berarti tindakan-tindakan lain di samping tarif yang secara efektif melarang atau membatasi produk-produk impor atau ekspor di antara negara-negara anggota.
3. *Quantitative restrictions* berarti pelarangan ataupun pembatasan dalam perdagangan di antara negara-negara anggota, baik dibuat secara efektif melalui kuota, lisensi, ataupun tindakan dengan efek penyeimbangan, termasuk tindakan administrasi dan persyaratan-persyaratan yang membatasi perdagangan.
4. *Foreign exchange restrictions* berarti tindakan yang diambil oleh negara-negara anggota dalam bentuk pembatasan dan prosedur administrasi lainnya dalam lingkup pertukaran asing yang memiliki efek dari pembatasan perdagangan.
5. PTA berarti *ASEAN Preferential Trading Arrangements* yang dispesifikasikan dalam *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* yang ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977, dan dalam *Protocol on Improvement on Extension on Tariff Preferences* di bawah

the Preferential Trading Arrangement, yang ditandatangani di Manila pada 15 Desember 1987.

6. *Exclusion List* berarti suatu daftar yang berisi produk-produk yang dikecualikan dari *the extension of tariff preferences* di bawah *the CEPT Scheme*.
7. *Agricultural products* berarti:
 - a. produk bahan-bahan mentah pertanian atau yang belum diproses yang diatur dalam pasal 1-24 dari *Harmonised System (HS)*, dan produk bahan-bahan mentah atau yang belum diproses yang serupa sesuai yang diatur dalam *HS Headings* lainnya; dan
 - b. produk-produk yang dihasilkan melalui proses sederhana dimana perubahan bentuk yang dihasilkan tidak terlalu berbeda dari bentuk awalnya.

Pasal 2: Ketentuan Umum

Dalam pasal ini ditentukan beberapa hal-hal yang umum ke dalam tujuh ayat, seperti:

- (1) Setiap negara-negara anggota diharuskan bergabung dalam *CEPT Scheme*.
- (2) Identifikasi produk-produk yang dimasukkan dalam *CEPT Scheme* akan disesuaikan dengan basis sektoral.
- (3) Pengecualian pada *HS 8/9 digit level* untuk produk-produk spesifik bagi seluruh negara-negara anggota yang secara temporal tidak siap untuk memasukkan produk-produk seperti hal tersebut ke dalam *the CEPT Scheme*. Terhadap produk-produk spesifik, yang sensitif bagi negara-negara anggota seperti yang diatur dalam Pasal 1 (3) dari *the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, dapat dikecualikan oleh negara anggota dari *CEPT Scheme*.
- (4) Suatu produk harus dianggap berasal dari negara-negara anggota ASEAN, jika 40% dari isi produk tadi berasal dari salah satu negara anggota.
- (5) Seluruh produk manufaktur, termasuk produk-produk penting, produk-produk pertanian yang telah diproses, dan

produk-produk yang di luar definisi produk-produk pertanian, seperti yang telah ditentukan di dalam perjanjian ini, harus ada dalam *CEPT Scheme*. Produk-produk ini akan secara langsung menjadi bagian dari pengurangan tarif, seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 dari perjanjian ini.

- (6) Seluruh produk di bawah PTA yang tidak dimasukkan ke dalam *CEPT Scheme* akan tetap diperlakukan sesuai MOP yang ada sejak 31 Desember 1992.
- (7) Negara-negara anggota, yang tarif-tarifnya diberlakukan terhadap produk-produk, yang telah disepakati, dikurangi dari 20% dan di bawah 0%-5%, meskipun dijamin pada suatu basis MFN, masih perlu diberikan pengakuan.

Pasal 3: Kelompok Produk

Dalam pasal ini ditentukan bahwa perjanjian ini akan berlaku bagi seluruh produk manufaktur, termasuk produk-produk penting, produk-produk pertanian yang telah diproses, dan produk-produk yang di luar definisi produk-produk pertanian. Seperti yang telah ditentukan di dalam perjanjian ini produk-produk pertanian harus dikecualikan dari *CEPT Scheme*.

Pasal 4: Jadwal Pengurangan Tarif

Dalam pasal ini terdapat 3 pasal yang mengatur mengenai pengaturan jadwal pengurangan tarif, yakni dimana negara-negara anggota setuju terhadap jadwal dari *effective preferential tariff reductions*, seperti

- (a) Pengurangan dari tingkat-tingkat tarif yang ada menjadi 20%. Hal ini akan dilakukan dalam jangka waktu 5 hingga 8 tahun, sejak 1 Januari 1993.
- (b) Pengurangan tingkat tarif selanjutnya adalah pengurangan dari 20% atau di bawahnya, yang harus dilakukan dalam jangka waktu 7 tahun. Tingkat pengurangan minimum harus 5% dari jumlah yang diperbolehkan per pengurangan. Program pengurangan harus diputuskan oleh setiap negara anggota pada awal program.
- (c) Terhadap produk dengan tingkat tarif sebesar 20% atau di bawah tarif 20%. Dua atau lebih negara anggota dapat ikut

dalam pengaturan-pengaturan pengurangan tarif sebesar 0%-5% terhadap produk-produk tertentu pada tahap percepatan yang diumumkan pada awal program.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 (1) (b) dalam perjanjian ini, produk-produk yang mencapai, atau berada pada tingkatan tarif 20% atau di bawahnya, harus secara langsung diberlakukan pengakuan. Jadwal-jadwal mengenai pengurangan tarif di atas tidak akan menghambat negara-negara anggota untuk mengurangi tarif mereka menjadi 0%-5% ataupun mengikuti jadwal percepatan pengurangan tarif.

Pasal 5: Ketentuan Lain

Dalam pasal ini diatur mengenai ketentuan lain, seperti *Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers*, *Foreign Exchange Restriction*, *Other Areas of Cooperation*, dan *Maintenance of Concessions*. Pada ketentuan pertamanya diatur bahwa setiap negara anggota harus mengurangi batasan kuantitas dan hambatan non-tarif terhadap produk-produk tertentu sesuai dengan skema CEPT. Dalam ketentuan keduanya diatur bahwa setiap negara anggota harus membuat pengecualian berkaitan dengan nilai mata uang asing untuk pembayaran produk-produk tertentu yang diatur dalam skema CEPT ini. Dalam ketentuan selanjutnya negara anggota harus mengembangkan tindakan lebih lanjut yang berkaitan dengan batas area kerja sama dalam menambah dan melengkapi liberalisasi perdagangan. Kemudian, dalam ketentuan terakhirnya diatur bahwa negara anggota tidak harus meniadakan kesepakatan berkaitan dengan penerapan metode pembiayaan kepastian.

Pasal 6: Tindakan Darurat

Tindakan darurat dalam pasal ini diatur demikian:

- (1) Bila hasil dari penerapan perjanjian ini, impor dari suatu produk tertentu sesuai dengan *CEPT Scheme* akan menyebabkan kerusakan terhadap sektor produksi yang memproduksi produk-produk yang kompetitif dalam negara importir, maka negara importir dapat melakukan

pencegahan ataupun perbaikan kerusakan tersebut sesuai dengan Pasal 6 (3) dari perjanjian ini.

- (2) Dengan menghormati kewajiban internasional, negara anggota, yang berpendapat bahwa penting untuk menciptakan atau mengintensifkan pembatasan kuantitas atau tindakan lain yang membatasi impor dengan suatu pandangan untuk bertindak mencegah ancaman dari atau menghentikan penurunan serius dari keuntungan moneter, harus mencoba untuk mengambil tindakan, yang melindungi nilai pengakuan yang telah disetujui sebelumnya.
- (3) Pemberitahuan segera atas tindakan darurat yang diambil dengan dasar pasal ini harus diberikan kepada *Council*, sesuai dengan apa yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 dari perjanjian ini, dan tindakan tersebut dapat menjadi subjek dari konsultasi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 di dalam perjanjian ini.

Pasal 7: Pengaturan Institusi

Dalam pasal ini diatur mengenai:

- (1) *The ASEAN Economic Ministers* (AEM), berdasar pada perjanjian ini, dibentuk *Council* setingkat menteri yang mewakili setiap negara anggota dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretariat ASEAN harus menyediakan dukungan terhadap *Council* setingkat menteri tadi untuk memantau, mengkoordinasi, dan melihat kembali penerapan dari perjanjian ini dan membantu *the AEM* dalam banyak hal yang berkaitan dengan hal tadi. Dalam menjalankan fungsinya, *Council* setingkat menteri tadi harus juga didukung oleh *Senior Officials' Meeting* (SEOM).
- (2) Negara-negara anggota yang memasuki pengaturan bilateral pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 4 dari perjanjian ini harus memberitahukan seluruh negara anggota dan Sekretariat ASEAN mengenai pengaturan tersebut.
- (3) Sekretariat ASEAN harus memonitor dan melaporkan kepada SEOM mengenai penerapan dari perjanjian ini sesuai dengan Pasal 3 (2) (8) dari *Agreement on the*

Establishing of the ASEAN Scretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 8: Konsultasi

Dalam pasal ini diatur mengenai konsultasi bagi negara-negara anggota, yang kemudian dituangkan ke dalam 3 ayat, yakni:

- (1) Negara-negara anggota harus memberikan kesempatan yang cukup untuk konsultasi berkenaan dengan perwakilan yang dibuat oleh negara-negara anggota lainnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi penerapan dari perjanjian ini. *Council* seperti yang ditentukan pada Pasal 7 dari perjanjian ini, dapat mencari perlindungan dari *the AEM* berkaitan dengan hal dimana sudah tidak mungkin untuk menemukan solusi yang cocok selama proses konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- (2) Negara-negara anggota, yang menyadari bahwa negara anggota lain tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini yang menghasilkan pengurangan keuntungan bagi mereka, boleh membuat perwakilan atau permohonan kepada negara-negara anggota lainnya dengan dasar untuk mendapatkan penyesuaian hingga dapat memuaskan dan dapat memberikan pertimbangan terhadap perwakilan atau permohonan yang telah dibuat tersebut.
- (3) Perbedaan di antara negara-negara anggota berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari perjanjian ini harus, sejauh mungkin, dapat dilaksanakan secara damai di antara para pihak. Apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, hal tersebut harus diajukan ke hadapan *Council*, seperti yang diatur dalam Pasal 7 dari perjanjian ini, dan apabila perlu, ke hadapan *the AEM*.

Pasal 9: Pengecualian Umum

Tidak ada ketentuan apapun dalam perjanjian ini yang menghalangi setiap negara anggota untuk mengambil dan mengadopsi tindakan, yang dianggap penting untuk melindungi keamanan nasionalnya, keamanan moral publik, dan perlindungan

terhadap terhadap pasal-pasal yang bernilai artistik, historis, dan arkeologi.

Pasal 10: Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dalam pasal ini:

- (1) Pemerintah dari negara-negara anggota harus mengambil beberapa tindakan yang sesuai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang lahir dari adanya perjanjian ini.
- (2) Perubahan terhadap perjanjian ini harus dibuat melalui konsensus dan harus menjadi efektif dengan diterima oleh seluruh negara-negara anggota.
- (3) Perjanjian ini akan menjadi efektif pada saat ditandatangani.
- (4) Perjanjian ini akan didepositokan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang kemudian akan membuat kopian sertifikasinya yang diperuntukkan bagi seluruh negara-negara anggota.
- (5) Tidak ada reservasi terhadap setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian ini.

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Perjanjian ini terkait dengan beberapa perjanjian lain yang ada di dalam lingkup ASEAN, seperti *ASEAN Preferential Trading Arrangements* yang ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977, *Protocol on Improvement on Extension on Tariff Preferences*, dan *the Preferential Trading Arrangement*, yang ditandatangani di Manila pada 15 Desember 1987. (Anita Komala)

North American Free Trade Agreement 1994

Latar Belakang (*Background*)

Keberadaan NAFTA ditujukan untuk mempererat hubungan kerja sama ekonomi di antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara geografis ketiga negara tersebut terletak di satu

wilayah yang berdekatan. Oleh karenanya, guna mengakomodasi kepentingan perdagangan di antara ketiga negara dibentuk NAFTA. NAFTA juga bertujuan untuk menopang perdagangan internasional dunia serta menjadi suatu *role-model* bagi kerja sama ekonomi regional lainnya yang dapat diikuti oleh negara-negara dunia. Dengan adanya NAFTA ketiga negara memiliki pasar yang luas bagi perdagangan barang dan jasa. Keberadaan *trade barriers* pun juga berkurang. NAFTA merupakan suatu kerja sama mutual antarnegara dan oleh karenanya terdapat sistem saling membantu (*mutual assistance*) di antara ketiga negara peserta. Di dalam *preamble* NAFTA disebutkan bahwa NAFTA diadakan untuk memastikan *a predictable commercial framework for business planning and investment*. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam mempererat hubungan kerja sama ekonomi di antara ketiga negara peserta. Di dalam dunia perdagangan sendiri dibutuhkan suatu kepastian agar masyarakat dapat membuat perencanaan yang matang bagi kegiatan usahanya. NAFTA merupakan suatu perjanjian yang memberikan kepastian bagi masyarakat ketiga negara peserta manakala masyarakat tersebut ingin berinvestasi di wilayah ketiga negara peserta. Selain itu, dengan adanya NAFTA restriksi yang sebelumnya dapat secara bebas diterapkan oleh masing-masing negara kepada negara peserta lainnya dapat terkoordinasi dengan baik. NAFTA juga memberikan jaminan terhadap persaingan usaha yang sehat antarkorporasi dari ketiga negara peserta. Proteksi terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat di ketiga negara peserta juga diakomodasi di dalam NAFTA. Selain itu, bursa lapangan kerja bagi para pekerja di ketiga negara peserta pun semakin besar dengan adanya NAFTA. Hal ini mengingat pasar ketiga negara menjadi milik bersama dengan limitasi tertentu. Pada dasarnya NAFTA bertujuan untuk menciptakan suatu standar perekonomian yang sama dari ketiga negara peserta.

Konsep (Concept)

North American Free Trade Agreement 1994 menghapuskan mayoritas pengenaan tarif pada barang dan jasa yang diperdagangkan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keberadaan NAFTA sendiri berasal dari perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan Kanada pada tahun 1989. Setelah beberapa waktu lamanya perjanjian antara Amerika Serikat dan Kanada tersebut dikembangkan sehingga mencakup Meksiko. NAFTA bertujuan untuk melancarkan arus perdagangan di antara ketiga negara peserta NAFTA yang nantinya akan membantu pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Utara. Restriksi yang sebelumnya dikenakan pada kendaraan bermotor, komputer, tekstil, dan sebagian untuk pertanian dieleminasi oleh NAFTA. Selain itu, NAFTA juga memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual baik berupa hak paten, hak merek, maupun hak cipta. Sifat dari NAFTA yang trilateral (berlaku hanya untuk tiga negara peserta) memberikan perlakuan yang sama bagi ketiga negara peserta terkecuali bidang pertanian. Khusus di bidang pertanian harus dilakukan perjanjian bilateral oleh negara-negara peserta. Hal ini demikian adanya karena Amerika sedemikian ketatnya mensubsidi dan memproteksi pasar pertaniannya sehingga sebagian besar perjanjian mengenai pertanian harus dilaksanakan secara bilateral.

Keberlakuan (Entry into Force)

Berdasarkan Pasal 2203 dikatakan bahwa NAFTA *shall entry into force* pada tanggal 1 Januari 1994 setelah melalui proses hukum nasional yang dilakukan masing-masing negara. Selanjutnya, para negara peserta akan melakukan pertukaran surat yang menyatakan bahwa prosedur hukum nasional untuk memberlakukan NAFTA telah dilaksanakan. Manakala meratifikasi NAFTA, negara peserta juga berkewajiban untuk meratifikasi *annex* yang ada. Hal ini dikarenakan ketentuan yang terdapat di dalam *annex* merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok NAFTA itu

sendiri. Teks yang berlaku otentik dalam NAFTA adalah teks dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis.

Prinsip Umum (*General Principles*)

National Treatment dan *Market Access for Goods* merupakan prinsip yang terdapat di dalam NAFTA. Berdasarkan prinsip *National Treatment* suatu produk negara lain akan diperlakukan sama dengan produk nasional manakala produk asing tersebut telah memasuki pasar negara bersangkutan. Berdasarkan Pasal 301 penerapan prinsip ini harus sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal III dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan hal-hal lainnya yang mengikutinya. Sementara itu, prinsip *Market Access for Goods* terdiri dari tarif, non-tarif dan konsultasi. Pada dasarnya manakala negara peserta dapat mengontrol hambatan tarif dan non tarif maka pasar di masing-masing negara terbuka untuk pemamfaatan. Adapun konsultasi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan negara-negara peserta manakala bersengketa. Kesemua prinsip umum yang terdapat di dalam NAFTA mengacu kepada prinsip-prinsip GATT. Hal ini bertujuan untuk menopang tujuan dari NAFTA yang adalah mempererat hubungan ekonomi negara-negara peserta dan sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam kegiatan perdagangan internasional.

Materi Pokok (*Main Features*)

NAFTA terdiri dari 22 Bab. Adapun hal-hal yang diatur di dalam 22 Bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab 1

Bab ini mengatur pembentukan area perdagangan bebas, tujuan NAFTA, hubungan NAFTA dengan perjanjian lainnya, hubungan NAFTA dengan perjanjian internasional di bidang lingkungan dan konservasi, serta ruang lingkup kewajiban para peserta. Berdasarkan Pasal 103, NAFTA bersifat superior dibandingkan perjanjian internasional lainnya yang dimiliki

oleh para negara peserta kecuali terdapat pengecualian tertentu di dalam NAFTA itu sendiri. Para peserta dari NAFTA juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan ketentuan di dalam GATT dalam melaksanakan kegiatan perdagangan mereka.

- **Bab 2**

Bab ini mengatur dua ketentuan dasar berkenaan dengan definisi. Pertama adalah ketentuan mengenai definisi dari *General Application* dan definisi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing negara terhadap terminologi yang terdapat di dalam NAFTA.

- **Bab 3**

Bab ini mengatur mengenai implementasi dari NAFTA. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa prinsip umum NAFTA adalah *National Treatment* dan *Market Access for Goods*. Sehubungan dengan hal ini, Bab 3 merupakan jembatan antara tujuan dengan prinsip umum. Bab 3 mengatur hal-hal berkenaan dengan *national treatment*, tarif, hambatan perdagangan non tarif, konsultasi dan definisi atas terminologi tertentu yang digunakan dalam NAFTA.

- **Bab 4**

Bab ini mengatur mengenai *Rules of Origin*. Di dalamnya diatur spesifik mengenai asal dari barang. Terdapat pula rumus-rumus penghitungan *Regional Value Content* yang akan mempengaruhi nilai transaksi dari barang.

- **Bab 5**

Bab ini mengatur mengenai *customs procedures*. *Customs procedures* meliputi kewajiban dalam bidang ekspor dan impor, *certificate of origin*, administrasi, penegakan hukum, pengawasan, upaya banding terhadap suatu perkara dan kerja sama antarnegara.

- **Bab 6**

Bab ini mengatur mengenai energi dan *basic petrochemicals*. Prinsip yang terdapat di Bab 6 berdasarkan Pasal 601 adalah penghormatan terhadap Konstitusi masing-masing negara, liberalisasi secara bertahap terhadap energi dan *basic petrochemicals*, serta keberadaan sektor energi yang kompetitif secara internasional demi kepentingan negara peserta. Untuk menopang keberadaan sektor energi yang kompetitif secara internasional para negara peserta akan menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam GATT berkenaan dengan energi dan *basic petrochemicals* termasuk restriksi yang terdapat di dalamnya. Namun demikian, ketentuan di dalam Pasal 603 menyatakan bahwa dengan adanya NAFTA tidak membatasi kegiatan perdagangan energi dan *basic petrochemicals* antara negara peserta NAFTA dengan negara non NAFTA. Selain itu Pasal 604 melarang pengenaan pajak atas energi atau *basic petrochemical good* oleh negara pengespor yang akan diekspor ke wilayah negara peserta lainnya.

- **Bab 7**

Di dalam Bab 7 terdapat pengaturan berkenaan dengan pertanian dan *phytosanitary measures*. Berdasarkan Pasal 701 ketentuan di dalam Bab 7 memiliki kekuatan mutlak manakala dipertemukan dengan ketentuan lain di dalam NAFTA yang tidak konsisten dengan masalah pertanian dan *sanitary*. Pada Pasal 703 ditentukan bahwa tindakan perlindungan sesaat (*safeguard*) atas pertanian lokal negara peserta dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan di dalam Annex 302.2. Bentuk *Safeguard* yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan kuota tarif. Pada Pasal 704 dan 705 terdapat ketentuan berkenaan dengan *domestic support* dan *export subsidies*. Kedua Pasal tersebut menekankan tindakan negara peserta harus sesuai dengan GATT. Tindakan seperti *domestic support* dan *export subsidies* disarankan tidak mengganggu kelangsungan produk negara lain.

- **Bab 8**

Pada Bab ini diatur mengenai tindakan darurat yang dapat dilakukan oleh negara peserta manakala terjadi peningkatan kuantitas barang dari negara pengekspor sehingga membahayakan produk domestik negara pengimpor. Salah satu opsi yang ditawarkan oleh Pasal 801 adalah memperkenankan negara pengimpor untuk menutup *rate of duty* sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian berkenaan dengan barang.

- **Bab 9**

Bab ini mengatur mengenai *standard related measures* (STM). STM sendiri merupakan suatu patokan yang digunakan oleh negara peserta dalam kegiatan perdagangan yang mereka miliki sehingga sesuai dengan komitmen yang sudah tercapai. Namun demikian STM tidak mencakup Bagian B dari Bab 7 mengenai pertanian dan *sanitary*. Berdasarkan Pasal 901 ketentuan teknis STM ini ditentukan oleh *governmental bodies*. Nantinya *governmental bodies* tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan di dalam Bab 10.

- **Bab 10**

Di dalam Bab ini diatur mengenai *government procurement*. Beberapa hal yang diatur di dalam Bab ini antara lain pelaksanaan tender, kualifikasi dari *suppliers*, dokumen tender, kaedah negosiasi, kerja sama teknis, dokumentasi tender, maupun program bersama untuk usaha kecil. Bab 10 sendiri memiliki beberapa *annex* yang mengatur mengenai keberadaan badan usaha milik negara dalam kegiatan perdagangan mereka di wilayah negara peserta.

- **Bab 11**

Bab 11 dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian A mengatur mengenai kegiatan investasi, Bagian B mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara peserta dengan investor dari negara peserta lain, dan Bagian C mengatur mengenai definisi. Berdasarkan Pasal 1102–1105, negara penerima investasi harus memperlakukan investor berdasarkan prinsip *national treatment* dan *most favoured nation*. Kedua prinsip di atas merupakan suatu

perlakuan standar yang harus diakomodasi oleh negara penerima investasi. Hal lain yang disebutkan di dalam ketentuan Bab 11 adalah perlakuan terhadap investor juga harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Perlakuan seperti *fairness*, *equitable treatment*, perlindungan penuh dan pengamanan merupakan satu kesatuan yang harus diberikan negara peserta kepada investor.

- **Bab 12**

Pada Bab ini diatur mengenai *cross border trade in services*. Hal-hal seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dari jasa tertentu merupakan hal-hal yang diatur di dalam Bab 12. Bab 12 mengecualikan berbagai macam jasa yang tidak diatur olehnya. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan (seperti diatur terdapat dalam Bab 14), penerbangan, badan usaha milik negara, pinjaman dari negara peserta lainnya bukan merupakan cakupan dari Bab ini.

- **Bab 13**

Hal yang diatur di dalam Bab 13 adalah telekomunikasi. Setiap negara peserta dapat mempublikasikan standar dan tindakannya berkenaan dengan akses telekomunikasi publik. Hal-hal yang dapat dipublikasikan, antara lain adalah tarif, spesifikasi, kondisi peralatan telekomunikasi untuk umum (*network*), masalah perizinan dan notifikasi. Dalam hal standardisasi, sebagaimana terdapat di dalam pasal 1308, masing-masing negara akan mengusahakan agar dapat menyesuaikan kondisi telekomunikasinya dengan ketentuan standar internasional. Pada Pasal 1307 dikatakan bahwa ketentuan di dalam Bab 13 memiliki kekuatan mutlak manakala terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan Bab 13 dengan Bab lainnya.

- **Bab 14**

Pada Bab ini diatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *financial service*. Ketentuan di dalam Bab ini memiliki

keterkaitan dengan ketentuan Bab 12 dan Bab 11 mengenai investasi. Pada Pasal 1403 ayat 1 dikatakan bahwa investor dari negara peserta lain dapat membuat suatu institusi finansial yang disesuaikan dengan pilihan dari investor tersebut. Dalam rangka menyokong kegiatan *cross border trade in services* dapat dibentuk suatu badan independen oleh negara peserta yang akan melakukan penilaian terhadap kegiatan tersebut. Berdasarkan Pasal 1402 badan tersebut bersifat *selfregulatory*.

- **Bab 15**

Bab ini mengatur hal-hal berkenaan dengan persaingan usaha. Pada dasarnya masing-masing negara peserta berkewajiban untuk mengusung prinsip-prinsip GATT dalam pelaksanaan NAFTA. Prinsip-prinsip di dalam GATT, layaknya *national treatment* dan *most favoured nation*, pun mendukung adanya persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan Pasal 1504 dapat dibentuk *working group* yang akan membantu mengevaluasi kegiatan persaingan usaha yang terjadi dalam perdagangan.

- **Bab 16**

Pada Bab ini diatur mengenai *temporary entry for business person*. Tujuan diadakannya Bab 16 adalah untuk memfasilitasi kegiatan bisnis warga negara para negara peserta NAFTA. Berdasarkan Pasal 1061 *temporary entry* dapat diberikan berdasarkan asas *repropositas* yakni berdasarkan kegiatan timbal balik dari negara peserta.

- **Bab 17**

Dalam Bab ini diatur hal-hal berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Masing-masing negara peserta berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap HKI yang dimiliki oleh warga negara dari negara peserta lainnya. Perlindungan terhadap warga negara dari negara peserta lainnya dilakukan sesuai dengan Konvensi internasional mengenai HKI seperti yang tercakup dalam:

- *The Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms*, 1971 (Geneva Convention);
 - *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 1971 (Berne Convention);
 - *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1967 (Paris Convention);
 - *The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, 1978 (UPOV Convention); dan
 - *The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, 1991 (UPOV Convention).
- **Bab 18**
Di dalam Bab ini diatur hal-hal berkenaan dengan publikasi, notifikasi, administrasi dari peraturan yang ada berkaitan dengan perdagangan dan NAFTA. Masing-masing negara peserta berkewajiban untuk menunjuk satu institusi yang menaungi perdagangan maupun NAFTA. Tujuannya adalah untuk mempermudah negara peserta manakala membutuhkan informasi terbaru mengenai negara peserta lainnya.
- **Bab 19**
Bab ini mengatur hal-hal berkenaan dengan penyelesaian sengketa dalam NAFTA.
- **Bab 20**
Bab ini dibagi ke dalam tiga bagian dengan judul besarnya *Institutional Arrangements and Dispute Settlement Procedures*. Bagian A mengatur mengenai institusi, Bagian B penyelesaian sengketa dan Bagian C proses hukum nasional serta penyelesaian secara perdata melalui lembaga lainnya. Berdasarkan Pasal 2001 dibentuk Komisi Perdagangan Bebas yang terdiri dari lima anggota berasal dari negara peserta. Komisi berkewajiban membantu menyelesaikan sengketa yang timbul antarnegara peserta NAFTA.

- **Bab 21**

Di Dalam Bab ini diatur hal-hal berkenaan dengan eksepsi yang dapat diberlakukan dalam pemberlakuan NAFTA. Berdasarkan Pasal 2101, ketentuan Pasal 20 GATT dijadikan bagian dari NAFTA. Namun demikian, ketentuan dalam GATT tersebut memiliki limitasi manakala bertemu dengan ketentuan di dalam NAFTA yang berkaitan dengan jasa atau investasi di dalam Bagian 2 (*Trade in Goods*) dan jasa yang terkandung di dalam Bagian 3 (*Technical Barriers to Trade*) NAFTA.

- **Bab 22**

Pengaturan yang terdapat di dalam Bab 22 merupakan pengaturan yang berkaitan dengan *annex*, *entry into force*, *amandement*, pengunduran diri, dan teks otentik dari NAFTA. Selain itu, berdasarkan pasal 2201 dinyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam *annex* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ke-22 Bab NAFTA dan oleh karenanya juga mengikat para peserta.

Mekanisme Khusus (*Specific Mechanism*)

Mekanisme khusus yang terdapat di dalam NAFTA adalah *Annex 401* dan *Annex 1* sampai dengan *Annex 7*. *Annex 401* sendiri dibagi ke dalam Bagian A tentang *General Interpretative Note*, Bagian B tentang *Specific Rules of Origin*, dan Bagian 1 sampai dengan Bagian 21. Di dalam keseluruhan *Annex 401* tersebut diatur hal-hal teknis meliputi komoditas perdagangan yang telah dicetuskan sebelumnya di dalam kedua puluh dua Bab yang terdapat dalam Materi Pokok NAFTA. Sementara itu di dalam *Annex 1* sampai dengan *Annex 7* diatur hal-hal teknis lainnya berkenaan dengan Bab 11, 12, dan 14. *Annex I* mengenai *Reservations for Existing Measures and Liberalization Commitments* merupakan tambahan bagi Bab 11, 12, dan 14. *Annex II* mengenai *Reservations for Future Measures* juga merupakan tambahan bagi Bab 11, 12, dan 14. Sementara *Annex III* mengenai *Activities Reserved to the State* dan *Annex IV* mengenai *Exceptions from Most-Favored-Nation Treatment* merupakan tambahan bagi

Bab 11. Tambahan bagi Bab 12 terkandung di dalam *Annex V* mengenai *Quantitative Restrictions* dan *Annex VI* mengenai *Miscellaneous Commitments*. Adapun *Annex VIII* merupakan tambahan bagi Bab 14 dan mengatur mengenai *Reservations, Specific Commitments and Other Items*.

Pengawasan (*Authority*)

Otoritas yang berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap NAFTA adalah Sekretariat Jenderal NAFTA yang dibentuk berdasarkan Pasal 2002. Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam NAFTA terutama untuk membantu penyelesaian sengketa perdagangan antara industri nasional dengan pemerintah secara adil, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat NAFTA terdapat di masing-masing negara dengan posisi sebagai berikut:

1. *Canadian Section* berlokasi di Ottawa;
2. *Mexico Section* berlokasi di Mexico City; dan
3. *United States Section* berlokasi di Washington District of Columbia.

Selain Sekretariat NAFTA, masing-masing negara juga memiliki sekretariat NAFTAny sendiri. Sekretariat nasional ini dikepalai oleh seorang sekretaris yang ditunjuk oleh masing-masing pemerintah. Dalam hal pengoperasian kantor lokal NAFTA masing-masing negara membiayainya sendiri.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Dispute*)

Pengaturan penyelesaian sengketa di dalam NAFTA diakomodasi oleh ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam Bab 11, Bab 19, dan Bab 20. Pada Bab 11 diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara negara peserta NAFTA dengan investor dari negara peserta NAFTA. Seorang investor yang menuntut negara peserta NAFTA dapat menggunakan mekanisme

penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan *The World Bank's International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID), ketentuan tambahan ICSID, *The Rules of the United Nations Commission for International Trade Law* (UNCITRAL Rules), atau melalui *local remedies* yang terdapat di masing-masing *host countries*.

Bab 19 merupakan mekanisme yang memberikan tinjauan terhadap anti-dumping dan *countervailing duty*. Berdasarkan Pasal 1904 Bab 19 suatu pemeriksaan terhadap anti-dumping dan *countervailing duty* dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan domestik yang dihadiri oleh panel independen yang ditunjuk NAFTA atas rekomendasi pemerintah negara peserta. Masing-masing negara peserta telah menentukan panel tersebut. Untuk dumping dan subsidi Pemerintah Kanada menunjuk kepada *Canada Border Services Agency* (CBSA) dan untuk masalah kerugiannya diserahkan kepada *Canadian International Trade Tribunal* (CITT). Untuk Amerika, Departemen Perdagangan diberikan kewenangan untuk menjadi panel dalam masalah dumping dan subsidi pemerintah. Sedangkan, Badan Administrasi Perdagangan Internasional diberikan kewenangan untuk menjadi panel dalam masalah kerugian akibat adanya dumping dan subsidi pemerintah. Sementara itu, Meksiko menyerahkan kedua tugas tersebut kepada *Secretaría de Economía, Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales*. Nantinya hasil penyelidikan yang turut dilaksanakan oleh Panel dapat diajukan banding kepada lembaga yang berwenang di masing-masing negara. Di Kanada terdapat *Federal Court of Canada*, Amerika memiliki *the United States to the Court of International Trade*, dan untuk Meksiko memiliki *Tribunal Fiscal de la Federación*. Selain melakukan banding, terdapat satu mekanisme lainnya untuk mengesampingkan putusan panel. Berdasarkan *Annex 1904.13* terdapat mekanisme yang disebut dengan *Extraordinary Challenge Committee* (ECC). ECC merupakan suatu tindakan *safeguard* yang digunakan untuk menjaga integritas panel oleh negara yang bersengketa manakala pemerintah negara yang bersengketa mempercayai terdapat kesalahan tertentu di dalam panel tersebut. Selain itu berdasarkan Pasal 1905 dapat juga dibentuk suatu komite yang terdiri dari

anggota. Nantinya komite ini melakukan penilaian terhadap tuntutan yang dilakukan oleh salah satu peserta atas ketentuan nasional peserta lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Panel. Kesemua ini ditujukan untuk menjaga keberadaan Panel.

Pada Bab 20 dari NAFTA juga terdapat ketentuan penyelesaian sengketa berkenaan dengan interpretasi dan aplikasi dari NAFTA. Ketentuan pada Bab ini mendorong penyelesaian sengketa untuk dilakukan melalui perjanjian. Langkah pertama adalah melalui konsultasi antarpemerintah. Manakala tidak terdapat kesepakatan maka pihak yang bersengketa dapat meminta pertemuan dengan *NAFTA Free-Trade Commission* yang terdiri dari para Menteri Perdagangan. Manakala *NAFTA Free-Trade Commission* masih belum menyelesaikan sengketa yang ada maka dapat dibentuk badan arbitrase yang terdiri dari lima anggota. Bab 20 sendiri juga mengatur keberadaan *scientific review boards* yang dipilih oleh Panel. *Scientific review boards* akan memberikan laporan kepada Panel di bidang lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan hal lainnya guna mendukung kinerja Panel.

Peraturan Terkait (*Related Regulation*)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
(Willyam Sarcinsong)